

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

EVALUASI PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Yogi Syahputra

Fakultas Ilmu SosialUniversitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email:yogi20102000@gmail.com

ABSTRACT

This suggested aims to determine the results of the evaluation of the KIA Program in Kuantan Singingi Regency. Evaluation theory uses William Dunn's theory, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The research method uses descriptive qualitative. Research informants from elements of the Population and Civil Registry Service of Kuantan Singingi Regency. Data analysis uses qualitative data analysis. as indicated by not meeting scheduled working hours, service procedures not making it easier for applicants, no outreach through placing billboards on roads and strategic locations, no direct outreach to the community through outreach to government officials at the level sub-district or village, efficiency is quite optimal, adequacy is still lacking, indicated by the minimum number of officers, especially service counter officers and operators, the absence of special service counters, the lack of work equipment for printers printing KIA blanks, the absence of information boards explaining the service flow, Program distribution is good, responsiveness is less than optimal, indicated by the officers' unfriendly attitude, being in a hurry, there are still errors in issuing KIA cards, the accuracy of implementation has not reached all areas in Kuantan Singingi Regency, data on target participants has not yet been updated. Based on the results of observations, interviews and documentation that have been carried out, it can be concluded that the implementation of the Child Identity Card (KIA) program at the Population and Civil Registration Service of Kuantan Singingi Regency has been running quite well.

Keywords: Child Evaluation and Identity Card

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi Program KIA di Kabupaten Kuantan Singingi. Teori evaluasi menggunakan teori William Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode

penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan penelitian dari unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Sosialisasi melalui pemasangan reklame di jalan dan lokasi strategis, tidak dilakukannya sosialisasi ke masyarakat secara langsung melalui sosialisasi kepada aparatur pemerintah tingkat kecamatan atau desa, efisiensi sudah cukup optimal, kecukupan masih kurang ditandai dari minimnya jumlah petugas, khususnya petugas loket pelayanan dan operator, tidak adanya loket pelayanan khusus, minimnya peralatan kerja printer cetak blanko KIA, tidak adanya papan informasi yang menjelaskan alur pelayanan, perataan program sudah baik, responsivitas kurang optimal ditandai dari sikap petugas kurang ramah, tergesa-gesa, masih adanya kesalahan dalam penerbitan kartu KIA, ketepatan pelaksanaan belum menjangkau seluruh daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, belum dilakukannya pembaharuan data target peserta. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik.

Kata Kunci : *Evaluasi dan Kartu Identitas Anak*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Diperkenalkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016, KIA bertujuan untuk memberikan identitas resmi bagi anak-anak di usia 0 hingga 17 tahun. KIA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen identitas, tetapi juga sebagai alat untuk memfasilitasi akses anak terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, serta untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara (Kementerian Dalam Negeri, 2016).

Di Kabupaten Kuantan Singingi, pemanfaatan KIA masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Meskipun program ini telah diperkenalkan sejak beberapa tahun lalu, banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya KIA dan prosedur pendaftarannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penerbitan KIA. Oleh karena itu, evaluasi pemanfaatan KIA di kabupaten ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan untuk merumuskan strategi peningkatan pemanfaatan KIA di masyarakat.

Sosialisasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan program KIA. Namun, hasil survei awal menunjukkan bahwa banyak orang tua di Kabupaten Kuantan Singingi yang masih kurang informasi mengenai manfaat KIA dan cara pendaftarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Dukcapil melaksanakan sosialisasi KIA dan strategi apa yang digunakan untuk menjangkau orang tua dan anak-anak di berbagai lapisan masyarakat.

Dampak KIA terhadap akses layanan publik juga perlu dievaluasi. Dengan adanya KIA, diharapkan anak-anak dapat lebih mudah mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi hak mereka. Namun, tantangan dalam implementasi KIA perlu diidentifikasi agar langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana KIA telah mempengaruhi kemampuan anak untuk mengakses layanan tersebut. Kendala administratif dalam proses penerbitan KIA juga menjadi perhatian penting. Prosedur yang rumit atau kurangnya fasilitas di Dukcapil dapat menghambat pendaftaran KIA, sehingga mengakibatkan banyak anak yang tidak memiliki identitas resmi. Penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah **"Evaluasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus Kabupaten Kuantan Tengah)."**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
b. Literatur mengenai KIA
c. Model Evaluasi Program Publik

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Rekomendasi Kebijakan untuk Dukcapil
b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
c. Perbaikan Akses Layanan Publik
d. Peningkatan Proses Pendaftaran KIA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Administrasi yaitu sebagai kegiatan dari pada kelompok mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan yang telah ditetapkan". Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan menjunjung kerjasama yang tinggi untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya berupa tujuan dari suatu organisasi.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

A. Formulasi

Persoalan pertama yang harus dilakukan dalam formulasi kebijakan publik *(public policy formulation)* adalah merumuskan masalah kebijakan *(policy problem formulation)* itu terdahulu. Islamy (1997) menegaskan bahwa hal yang lebih penting agar suatu masalah publik *(public problem)* bisa menjadi masalah kebijakan *(policy problem)* tidak cukup hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah tetapi masyarakat juga perlu memiliki political will untuk memperjuangkan masalah itu menjadi masalah kebijakan dan yang lebih penting lagi hal itu ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan (Joko Widodo, 2007 : 51)

B. Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satutujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.

C. Evaluasi

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu kebijakan publik, dengan kata lain sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja, melainkan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai ”evaluasi kebijakan”. Evaluasi kebijakan itu sendiri dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertangungjawabkan kepada konstituennya. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan.

William N. Dunn dalam Sudiro (2018:63) mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Lebih jelas Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasri pemilihan tujuan dan target. Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, ketepatan.

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

2.1.3 Teori/Konsep Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 Pasal (1) disebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2.1.4 Teori/Konsep Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Kurniawati Dhoni sumber daya manusia merupakan suatu kebijakan perusahaan dan cara-cara yang dipraktekan dan berhubungan dengan pemberdayaan manusia atau aspek-aspek dari manajemen sumber daya manusia dari posisi manajemen termasuk adanya kebijakan perekrutan karyawan, seleksi dalam melakukan rekrut karyawan, mengadakan pelatihan agar lebih memahami lebih dalam mengenai tugas dan tanggung jawab atas posisi yang dibebankan, penghargaan atas pencapaian yang telah dicapai serta melakukan penilaian kinerja karyawan di suatu perusahaan. Pendidik, terutama orang tua dalam rumah tangga dan guru di sekolah adalah contoh ideal bagi anak. Salah satu ciri utama anak adalah meniru, sadar atau tidak, akan meneladani segala sikap, tindakan, dan perilaku orang tuanya, baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan maupun dalam pemunculan sikap-sikap kejiwaan, seperti emosi, sentimen, kepekaan, dan sebagainya. (Dhoni Kurniawati 2018).

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bentuk aktualisasi penentuan mengenai mendasarnya orang *(personalia)* sebagai aset kunci dari suatu lembaga dan harus di sempurnakan, yang akhirnya dapat menghasilkan makna besar bagi suatu lembaga ataupun dirisendiri. Manajemen sumber daya manusia dapat dimaknakan seperti penangan lembaga baik tersendiri ataupun bersama-sama mengenai individu untuk menghasilkan manfaatyang optimal agar tercapainya visi lembaga.

2.1.5 Teori/Konsep Program Kartu Identitas Anak

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh Pemerintah di 50 Kabupaten dan Kota diIndonesia pada tahun 2016. Tujuan Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

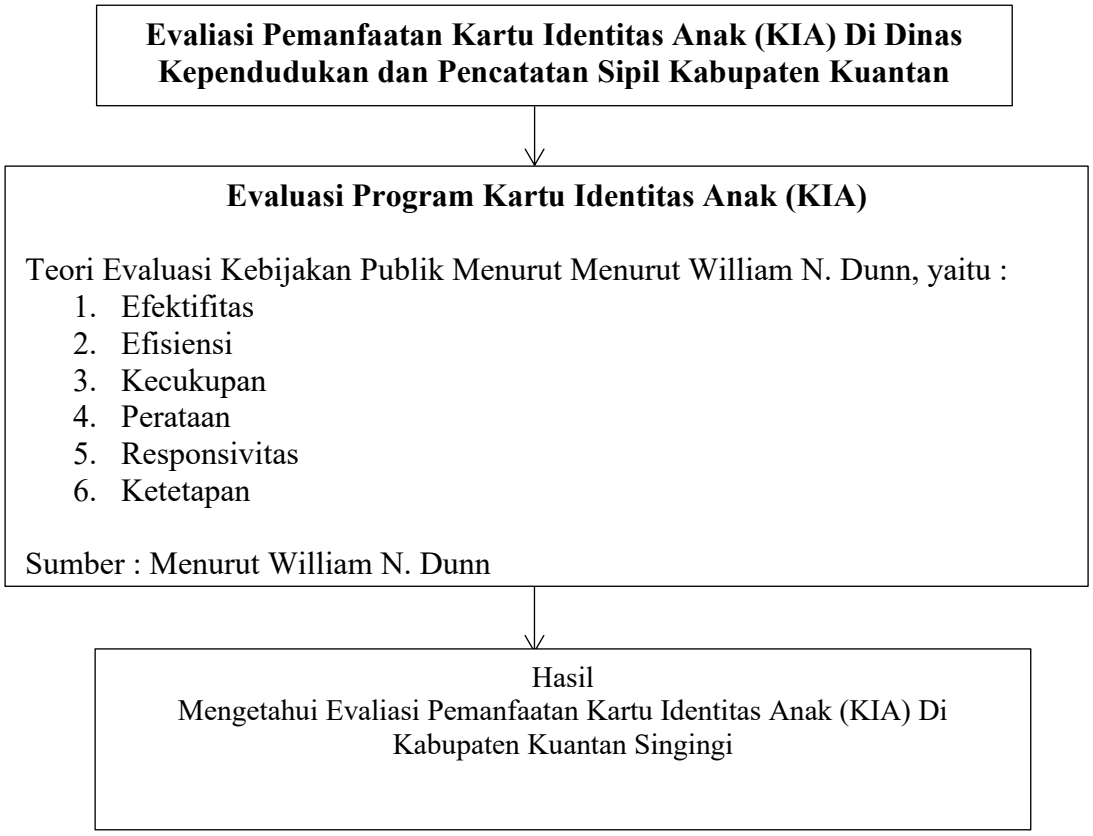
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten dan Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui KIA akan mendorong peningkatan

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak Indonesia. Regulasi yang mendasari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Indentitas Anak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi peneliti 2025

2.3 Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah diduga Evaliasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi belum terevaluasi.

2.4 Defenisi Operasional

Indikator evaluasi program :

2.4.1 Efektivitas
2.4.2 Efisiensi
2.4.3 Kecukupan

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

2.4.4 Perataan
2.4.5 Responsivitas
2.4.6 Ketetapan

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Penelitian Evaliasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item Penelitian
Evaluasi Kebijakan Publik	1. Evktifitas	a. Tingkat Penerimaan Kartu	Ordinal
		b. Peningkatan Akses Layanan	
		c. Umpan Balik Masyarakat	
	2. Evisiensi	a. Biaya Operasional per Kartu	Ordinal
		b. Waktu Pemprosesan	
		c. Sumber Daya Manusia	
	3. Kecukupan	a. Proporsi Anak yang Memiliki Kartu	Ordinal
		b. Ketersediaan Informasi	
		c. Aksesibilitas Lokasi Pendaftaran	
	4. Perataan	a. Distribusi Kartu Berdasarkan Wilayah	Ordinal
		b. Akses Berdasarkan Status Sosial	
		c. Keterjangkauan Pendaftaran	
	5. Responsifitas	a. Waktu Respons terhadap Keluhan	Ordinal
		b. Jumlah Umpan Balik yang Diterima	
		c. Peningkatan Layanan Berdasarkan Umpan Balik	
	6. Ketetapan	a. Tingkat Kepatuhan Prosedur	Ordinal

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item Penelitian
		b. Audit Kepatuhan	
		c. Konsistensi Kebijakan	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau konteks tertentu melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan konteks yang melibatkan partisipan dalam situasi yang diteliti. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih menekankan pada pengukuran dan analisis data numerik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman konsep dan proses sosial.

3.2 Informan

Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.Adapun informan penelitian tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian Tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

No	Unsur Informasi	Jumlah Informasi	Persentase (%)
1	Kepala Dinas	1	9%
2	Sekretaria	1	9%
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	9%
4	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	9%
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	9%
6	Masyarakat	6	54%
Jumlah		11	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2025

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2019), data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari pengumpulan data. Data yang diperoleh merupakan hasil dari angket yang telah dibagikan kepada responden, yang kemudian responden akan menjawab pernyataan yang sudah tersusun secara sistematis dalam lembar kuesioner.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono, (2018) menyatakan bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, internet dan lain–lain.

3.4. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Evaluasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.

3.6.2 Dokumentasi

Sugiyono (2018:240) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk dalam tulisan (catatan harian, peraturan kebijakan), gambar (foto, gambar, sketsa), atau karya monumental dari seseorang.

3.6.3 Observasi

Observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian dan hubungannya terhadap keseluruhannya *(Spradley).*

3.7.1 Pengumpulan Data
3.7.2 Reduksi Data
3.7.3 Penyajian Data

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Evaluasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapaten Kuantan Singingi

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapaten Kuantan Singingi, maka peneliti menggunakan teori Pandangan William N. Dunn dalam Sudiro (2018:63) mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Lebih jelas Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasri pemilihan tujuan dan target. Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, ketepatan.

Indikator Efektifitas

Efektivitas pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari sejauh mana tujuan utama program ini tercapai, yaitu memberikan identitas resmi kepada seluruh anak, memudahkan akses layanan publik, serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan sejak dini. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa program KIA telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen identitas bagi anak. Banyak orang tua yang sebelumnya kurang memahami manfaat KIA, kini mulai aktif menguruskan KIA untuk anak-anak mereka, terutama setelah adanya persyaratan KIA dalam pendaftaran sekolah dan akses layanan kesehatan. Efektivitas program ini masih menghadapi tantangan. Sosialisasi yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, belum sepenuhnya memahami urgensi KIA. Selain itu, masih terdapat anak-anak yang belum memiliki KIA karena orang tua mereka belum mendapatkan informasi yang cukup atau merasa proses pengurusan masih merepotkan. Meski demikian, secara umum, program ini sudah memberikan dampak positif dalam meningkatkan legalitas identitas anak dan memperkuat basis data kependudukan daerah.

Indikator Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan program KIA diukur dari penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga) untuk mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara, pengurusan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tidak memerlukan biaya (gratis), sehingga tidak membebani masyarakat secara finansial. Proses pembuatan KIA pun relatif singkat, rata-rata memakan waktu 2-3 hari kerja jika semua persyaratan lengkap. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari dinas untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses. Efisiensi masih terkendala oleh keterbatasan jumlah petugas, terutama pada saat terjadi lonjakan permohonan, misalnya menjelang tahun ajaran baru. Antrean panjang dan waktu tunggu yang lebih lama kadang masih dialami masyarakat.

Selain itu, sistem pelayanan yang berbasis manual di beberapa wilayah menyebabkan proses menjadi kurang efisien, terutama jika terjadi gangguan teknis atau kendala pada jaringan internet. Upaya digitalisasi dan penambahan petugas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ke depannya.

Indikator Kecukupan

Kecukupan program KIA mencakup sejauh mana kebutuhan masyarakat akan dokumen identitas anak telah terpenuhi. Berdasarkan data dan wawancara, kebutuhan akan KIA mulai dirasakan masyarakat, terutama setelah adanya kebijakan yang mewajibkan KIA pada saat pendaftaran sekolah. Namun, kecukupan program ini masih belum menyeluruh. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum tersentuh sosialisasi, sehingga belum mengurus KIA untuk anak-anak mereka. Dinas Dukcapil telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi ke sekolah, posyandu, dan desa-desa, serta membuka layanan keliling untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari kantor dinas. Meski demikian, keterbatasan sumber daya dan medan geografis yang sulit menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan KIA secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih agresif dan inovatif agar semua anak di Kabupaten Kuantan Singingi dapat memiliki KIA.

Indikator Perataan

Perataan atau distribusi KIA menjadi indikator penting untuk memastikan keadilan akses bagi seluruh anak di berbagai wilayah, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi KIA di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum sepenuhnya merata. Anak-anak di daerah perkotaan lebih mudah mendapatkan KIA karena akses ke dinas lebih dekat dan informasi lebih mudah didapatkan. Sementara itu, anak-anak di daerah pedesaan atau wilayah terpencil masih banyak yang belum memiliki KIA. Dinas Dukcapil telah berupaya melakukan layanan keliling dan menjalin kerja sama dengan pemerintah desa untuk memperluas cakupan distribusi KIA. Namun, perbedaan tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi tingkat kepemilikan KIA. Keluarga dengan tingkat pendidikan rendah atau keterbatasan ekonomi cenderung kurang memahami pentingnya KIA, sehingga program ini perlu didukung dengan edukasi yang lebih intensif dan pendekatan yang lebih personal di wilayah-wilayah tersebut.

Indikator Perataan

Responsivitas dinas dalam menanggapi kebutuhan, keluhan, dan masukan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi program KIA. Dari hasil wawancara, masyarakat menilai petugas dinas cukup responsif, terutama dalam memberikan penjelasan dan membantu proses pengurusan KIA di loket pelayanan. Dinas juga menyediakan berbagai saluran pengaduan, seperti kotak saran, hotline, dan media sosial, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan dengan mudah. Responsivitas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penanganan keluhan yang memerlukan koordinasi lintas bidang atau perbaikan

sistem. Beberapa masyarakat mengeluhkan keterlambatan respon, terutama saat volume permohonan tinggi atau terjadi gangguan teknis. Selain itu, evaluasi terhadap umpan balik masyarakat belum sepenuhnya optimal, sehingga beberapa perbaikan layanan berjalan lambat. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi serta pelibatan masyarakat dalam survei kepuasan menjadi langkah penting untuk meningkatkan responsivitas ke depan.

Indikator Perataan

Ketepatan dalam pemanfaatan KIA berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program terhadap standar operasional prosedur (SOP), regulasi, dan kebutuhan riil masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program KIA di Kabupaten Kuantan Singingi telah mengikuti SOP yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. Petugas diwajibkan menjalankan prosedur yang baku dalam setiap tahapan pelayanan, mulai dari penerimaan berkas, verifikasi data, hingga pencetakan dan penyerahan KIA. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman petugas terhadap perubahan regulasi terbaru atau keterlambatan dalam penyampaian informasi kebijakan baru kepada masyarakat. Dinas telah melakukan pelatihan dan evaluasi berkala untuk memastikan ketepatan pelaksanaan program, namun perlu ada peningkatan dalam hal sosialisasi kebijakan baru, baik kepada petugas maupun masyarakat. Ketepatan juga perlu dijaga agar tidak terjadi diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap masyarakat dari latar belakang tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik, Pelaksanaan program KIA di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan cukup baik pada seluruh indikator Dengan demikian, pelaksanaan program KIA dapat dikatakan cukup terlaksana, namun tetap membutuhkan peningkatan di berbagai aspek agar tujuannya dapat tercapai secara maksimal.

Saran

6.2.1 Perluas Sosialisasi
6.2.2 Tambah Jumlah dan Tingkatkan Kompetensi Petugas
6.2.3 Sediakan Fasilitas Pendukung yang Memadai
6.2.4 Perluas Jangkauan Pelayanan
6.2.5 Lakukan Monitoring dan Evaluasi Rutin

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.G, Subarsono. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, N. William. 2018. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

D, Mulyadi. (2022). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hasibuan, Malayu SP. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakankeempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.

J, Widodo. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia.

Kurniawati, Dhoni. "*Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Relevansinya Dengan Manajemen Modern.*" Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 11, no. 1 (2018): 29.

L, Agustino. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Niam, M. Fathun, et al. "*Metode penelitian kualitatif*." (2024).

Safi'I, HM. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.* Malang: Averroes Press.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development.* Bandung : Alfabeta

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*: Konsep dan Aplikasi Proses

B. Jurnal

Alaslan, Amtai. "Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar." (2021).

Auliya, Nur Hikmatul, et al. *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Dartiningsih, Bani Eka. "Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian." *Buku Pendamping Bimbingan Skripsi* 129 (2016).

Data, Teknik Pengumpulan. "Observasi." *Wawancara, Angket Dan Tes* (2019).

Jai, Stefanus Arwandi, Dody Setyawan, and Ignatius Adiwidjaja. "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 5.1 (2016).

Hidayat, Eet Saeful. "Analisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten

Garut." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5.4 (2019): 8-16.

Kurniawati, Doni. 2018 "Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Persepektif Islam dan elevansinnya dengan Manajemen Moderen." Kementrian Agama Lampung Timur 11, No. 1.

Lince, Leny. "Implementasi kurikulum merdeka untuk meningkatkan motivasi belajar pada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*. Vol. 1. 2022.

Marliani, Lina. "Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5.4 (2019): 17-21.

Putri, Inez Setia, Rumzi Samin, and Agus Hendrayady. "Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 20.2 (2022): 116-127.

Sitoha, Maximilian Jeremia Atur Parsaoran, and Dyah Lituhayu. "Evaluasi Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri no 2 tahun 2016 Kartu Identitas Anak)." *Journal of Public Policy and Management Review* 13.4 (2024): 40-58.

Sos, Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, 2020.

Utama, Johan. "Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara." (2014).

Yati, Ida, et al. "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu)." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 12.2 (2021): 83-96.

Zakir, Fauzan. "Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 2.1 (2020): 39-45.